

**RELEVANSI DESENTRALISASI TERHADAP DINAMIKA PEMERINTAHAN
LOKAL: KAJIAN LITERATUR PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
NAGARI KABUPATEN AGAM**

Teddy Pratama¹, Aldri Frinaldi², Hendra Naldi³, Lince Magriasti⁴

Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang^{1,2,3,4}

e-mail: teddypratama54@gmail.com, aldri@fis.unp.ac.id, hendranaldi@fis.unp.ac.id,
lincemagriasti@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Desentralisasi merupakan salah satu pilar penting dalam administrasi publik yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat kemandirian daerah. Penerapan desentralisasi di Indonesia diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang memberi ruang bagi pemerintah lokal untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi teori desentralisasi terhadap dinamika pemerintahan lokal dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan nagari di Kabupaten Agam. Metode yang digunakan adalah kajian literatur, yaitu dengan menelaah teori-teori desentralisasi, regulasi tentang pemerintahan daerah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori desentralisasi tidak hanya memiliki landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal, tetapi juga memberikan kerangka konseptual untuk memahami dinamika pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Agam, nagari sebagai satuan pemerintahan lokal khas Minangkabau berperan strategis dalam menggerakkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Model pemerintahan nagari memperlihatkan bagaimana teori desentralisasi menemukan relevansinya, yaitu dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan pembangunan. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan nagari, koordinasi antarlevel pemerintahan, dan keberlanjutan program pemberdayaan yang sering terkendala oleh faktor sumber daya. Artikel ini menyimpulkan bahwa relevansi teori desentralisasi dalam praktik pemerintahan nagari di Kabupaten Agam tidak hanya memperkuat partisipasi masyarakat, tetapi juga menegaskan pentingnya penguatan kapasitas institusional.

Kata Kunci: *Relevansi Desentralisasi, Pemerintahan Lokal, Pemberdayaan Masyarakat*

ABSTRACT

Decentralization is one of the fundamental pillars in public administration that aims to bring government services closer to the people, enhance public participation, and strengthen regional autonomy. The implementation of decentralization in Indonesia is manifested through regional autonomy policies that provide space for local governments to manage governmental affairs in accordance with their needs and potentials. This article aims to analyze the relevance of decentralization theory to the dynamics of local governance, with a particular focus on community empowerment and the nagari system in Agam Regency. The method employed is a literature review, examining theories of decentralization, regulations on regional governance, and relevant previous studies. The findings indicate that decentralization theory not only provides a normative foundation for local governance but also offers a conceptual framework for understanding development dynamics based on community participation. In the context of Agam Regency, the nagari, as a distinctive local governance unit of the Minangkabau tradition, plays a strategic role in driving development and empowering communities. The nagari

governance model illustrates how decentralization theory finds its relevance by allowing communities to be directly involved in planning, decision-making, and the implementation of development programs. Nevertheless, several challenges remain, such as limited institutional capacity at the nagari level, coordination among different levels of government, and the sustainability of empowerment programs, which are often constrained by resource limitations. This article concludes that the relevance of decentralization theory in the practice of village governance in Agam Regency not only strengthens community participation, but also emphasizes the importance of strengthening institutional capacity.

Keywords: *Relevance of Decentralization, Local Governance, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu pilar utama reformasi pemerintahan di Indonesia sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperluas ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah lokal. Dalam perspektif teoritis, desentralisasi mencakup dimensi administratif, fiskal, dan politik yang menjadi kerangka konseptual dalam memahami bagaimana kewenangan serta sumber daya dialihkan dari pusat ke daerah dan bagaimana hal tersebut memengaruhi tata kelola pemerintahan lokal (Rahim et al., 2024). Meski telah berlangsung cukup lama, pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan seperti kesenjangan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta persoalan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek krusial dalam pemerintahan lokal karena memastikan warga dapat terlibat secara langsung dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi semacam ini sejalan dengan gagasan desentralisasi yang menekankan pentingnya akuntabilitas serta peran aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Meski demikian, penerapan konsep tersebut belum sepenuhnya terwujud di berbagai daerah, termasuk dalam konteks nagari di Sumatera Barat yang masih jarang dikaji secara mendalam. Berbagai hambatan seperti keterbatasan kapasitas, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kurangnya transparansi pemerintah daerah menjadi tantangan utama dalam mengaktualisasikan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan semangat desentralisasi (Adabi, 2024).

Kabupaten Agam di Sumatera Barat memiliki sistem pemerintahan nagari yang berakar kuat pada adat Minangkabau dan berfungsi tidak hanya sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial serta budaya masyarakat. Keunikan ini menghadirkan dinamika tersendiri dalam melihat bagaimana teori desentralisasi dijalankan, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Faktor seperti kondisi geografis, kapasitas kelembagaan nagari, serta kewenangan lokal menjadi variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan. Keberhasilan desentralisasi pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi yang tersedia. Kapasitas kelembagaan yang kuat menjadi syarat penting agar pelimpahan kewenangan benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Siswidiyanto dan Sahputri (2023), tanpa dukungan kapasitas yang memadai, desentralisasi berpotensi hanya menjadi beban administratif tanpa memberikan peningkatan nyata terhadap pembangunan manusia maupun kesejahteraan masyarakat.

Kajian literatur secara sistematis menunjukkan bahwa partisipasi publik sebagai salah satu implikasi desentralisasi belum sepenuhnya berjalan efektif. Artikel "*Decentralization and Public Participation: A Literature Review on Impact and Implementation*" menyoroti hambatan seperti rendahnya pemahaman warga terhadap mekanisme partisipatif, keterbatasan

transparansi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Sejalan dengan itu, Adabi (2024) juga menegaskan bahwa kendala serupa masih menjadi tantangan utama sehingga diperlukan analisis teoritis untuk melihat bagaimana kerangka desentralisasi dapat menawarkan solusi dalam memperkuat partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Dalam konteks nagari dan pemberdayaan masyarakat, sejumlah penelitian lokal menunjukkan bahwa pemanfaatan dana nagari selama pandemi COVID-19 dapat menjadi instrumen inovatif untuk memperkuat kapasitas warga, khususnya ketika didukung legitimasi lokal, kolaborasi dengan elit setempat, serta partisipasi aktif masyarakat. Studi Safitri et al. (2023) menegaskan bahwa praktik adaptif semacam ini membuktikan relevansi teori desentralisasi ketika dipadukan dengan kearifan lokal. Namun demikian, persoalan seperti legitimasi, keterbatasan sumber daya, serta keberlanjutan program pemberdayaan tetap menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius.

Studi mengenai pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan, dukungan kebijakan lokal melalui regulasi maupun pendanaan, serta kapasitas inovasi institusi dan pemanfaatan teknologi. Artikel *“A New Approach to Community Empowerment-Based Tourism Village Development in Indonesia”* menekankan bahwa kombinasi antara dukungan pemerintah, partisipasi aktif komunitas, dan penguatan institusi lokal merupakan faktor penentu utama. Sejalan dengan itu, Pamuja et al. (2024) menemukan bahwa keberhasilan program desa wisata tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi atau dana, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan inovasi lokal. Temuan ini relevan untuk konteks nagari di Kabupaten Agam, di mana potensi masyarakat cukup besar namun masih membutuhkan dukungan kelembagaan.

Kajian literatur dalam beberapa dekade terakhir memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara teori dan praktik desentralisasi. Secara konseptual, pelimpahan kewenangan diyakini mampu mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan lokal, namun dalam implementasinya kerap muncul persoalan seperti ketidaksinkronan kebijakan, disparitas sumber daya, serta lemahnya kapasitas kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa relevansi teori desentralisasi perlu terus diuji melalui konteks spesifik, termasuk pada nagari di Kabupaten Agam, di mana studi yang secara sistematis menelaah tantangan dan strategi adaptasi lokal masih terbatas (Siswidiyanto & Sahputri, 2023).

Artikel ini bertujuan melakukan kajian literatur untuk menelaah sejauh mana teori desentralisasi relevan dalam memahami dinamika pemerintahan lokal, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan nagari di Kabupaten Agam. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: *Seberapa relevan teori desentralisasi terhadap praktik pemerintahan nagari dan upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal?* Untuk menjawabnya, penelitian ini merumuskan tiga sub-pertanyaan: (1) teori desentralisasi apa saja yang dominan digunakan dalam literatur pemberdayaan masyarakat di Indonesia; (2) hambatan dan tantangan apa yang dihadapi dalam praktik pemberdayaan di nagari, termasuk persoalan kelembagaan, kapasitas, regulasi, dan budaya lokal; serta (3) implikasi dari praktik tersebut terhadap penguatan otonomi daerah dan pengembangan model pemerintahan nagari yang lebih responsif dan berbasis masyarakat.

Dengan menelaah relevansi teori desentralisasi melalui kajian literatur yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan nagari di Kabupaten Agam, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, kajian ini tidak hanya memperkaya pemahaman mengenai bagaimana desentralisasi dijalankan dalam konteks lokal yang khas, tetapi juga menegaskan pentingnya sistem pemerintahan nagari yang sarat dengan nilai historis, sosial, dan kultural sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang

partisipatif. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan strategis bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta keberlanjutan program pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan nyata dan tantangan pembangunan masyarakat nagari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*literature review*) yang berfokus pada analisis teori desentralisasi dan relevansinya terhadap dinamika pemerintahan lokal, khususnya pemberdayaan masyarakat dan nagari di Kabupaten Agam. Kajian literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah, mengkritisi, serta mensintesis temuan-temuan dari penelitian sebelumnya sehingga dapat membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti (Snyder, 2019). Pendekatan ini relevan untuk menjawab pertanyaan konseptual sekaligus mengaitkan teori dengan praktik pemerintahan lokal di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel jurnal, buku akademik, prosiding konferensi, serta dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2019–2024). Sumber-sumber tersebut diakses melalui basis data internasional seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, serta repositori nasional seperti Garuda dan Neliti. Seleksi literatur dilakukan menggunakan kriteria inklusi, yaitu publikasi yang secara langsung membahas desentralisasi, pemerintahan lokal, pemberdayaan masyarakat, atau nagari, serta kriteria eksklusi berupa publikasi yang tidak relevan dengan konteks Indonesia. Pendekatan ini diharapkan memastikan validitas dan keterkinian literatur yang dianalisis (Xiao & Watson, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep yang muncul dari literatur. Analisis ini memungkinkan peneliti menyusun peta konseptual mengenai relevansi teori desentralisasi dengan dinamika pemerintahan nagari, termasuk faktor pendukung, hambatan, serta implikasi kebijakan. Proses analisis dilakukan secara iteratif melalui tahap pengkodean, kategorisasi, dan sintesis temuan (Braun & Clarke, 2021). Hasil sintesis kemudian digunakan untuk menyusun argumentasi teoretis yang menjadi dasar pembahasan. Untuk menjamin kredibilitas kajian, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sumber dengan membandingkan literatur akademik, data kebijakan, serta praktik lapangan yang terdokumentasi secara sistematis dan terukur. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan konteks lokal Kabupaten Agam sebagai fokus penting, terutama terkait peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam mendukung proses desentralisasi. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki nilai aplikatif. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori desentralisasi sekaligus memperkuat praktik pemerintahan lokal di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

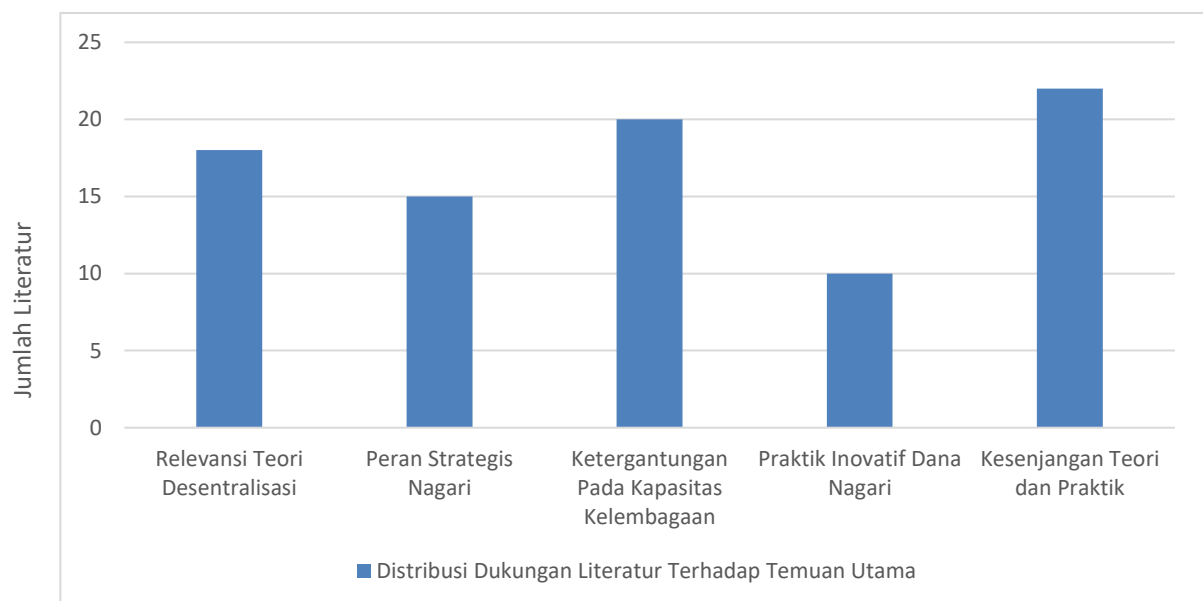
Kajian literatur yang dilakukan terhadap berbagai sumber akademik serta dokumen resmi periode 2019–2024 menghasilkan lima tema utama yang menyoroti relevansi teori desentralisasi dalam dinamika pemerintahan lokal. Fokus utama terletak pada konteks pemberdayaan masyarakat dan penguatan nagari di Kabupaten Agam, yang mencerminkan bagaimana prinsip desentralisasi diterapkan pada level lokal. Lima tema tersebut meliputi aspek penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, tata kelola berbasis kearifan

lokal, optimalisasi potensi nagari, serta keberlanjutan program pemberdayaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk memperjelas hasil kajian, temuan-temuan tersebut disajikan secara sistematis melalui tabel, grafik, dan deskripsi verbal. Tabel digunakan untuk merangkum pokok informasi dari berbagai sumber, grafik menampilkan pola dan tren yang muncul, sedangkan deskripsi verbal memberikan analisis serta interpretasi lebih mendalam. Penyajian ini bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai keterkaitan teori desentralisasi dengan praktik pemerintahan nagari di Kabupaten Agam.

Tabel 1. Temuan Utama Kajian Literatur dan Jumlah Literatur yang Mendukung

No	Temuan Utama	Jumlah Literatur Yang Mendukung
1	Relevansi teori desentralisasi sebagai kerangka konseptual	18
2	Peran strategis nagari dalam pemerintahan lokal	15
3	Ketergantungan pemberdayaan pada kapasitas kelembagaan	20
4	Praktik inovatif dana nagari selama pandemi	10
5	Kesenjangan antara teori dan praktik desentralisasi	22



Gambar 1. Distribusi Dukungan Literatur Terhadap Temuan Utama

Secara umum, hasil sintesis pada tabel 1 dan gambar 1 diatas menunjukkan bahwa teori desentralisasi masih memiliki relevansi yang kuat sebagai kerangka konseptual untuk memahami praktik pemerintahan lokal. Sebanyak 18 literatur menegaskan bahwa desentralisasi tidak hanya sekadar pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah saja, tetapi juga merupakan strategi yang mampu mendekatkan pelayanan, memperkuat akuntabilitas, dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara berkesinambungan. Hal ini tampak dalam praktik pemerintahan nagari di Kabupaten Agam yang mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam musyawarah nagari maupun dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan di nagari.

Lebih jauh lagi, peran strategis nagari sebagai institusi lokal khas Minangkabau mendapat perhatian secara signifikan dalam 15 literatur yang dikaji. Dalam hal ini, Nagari dipahami bukan hanya sebagai unit administratif saja, melainkan juga sebagai pusat kehidupan

sosial dan budaya yang mampu mendorong keberagaman dan mengintegrasikan nilai adat Dengan menerapkan prinsip demokrasi modern. Dengan adanya fungsi ini membuat nagari menjadi arena penting bagi implementasi desentralisasi, di mana aspirasi warga dapat diakomodasi melalui mekanisme deliberatif yang berbasis musyawarah.

Selain itu, tema yang paling menonjol berdasarkan tabel dan grafik diatas adalah adanya ketergantungan pemberdayaan masyarakat pada kapasitas kelembagaan yang didukung oleh 20 literatur yang ada. Keberhasilan program pemberdayaan di nagari sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur, mekanisme perencanaan yang strategis, transparansi anggaran yang terbuka, serta kemampuan membangun kerja sama tidak hanya dengan pihak internal tetapi juga dengan pihak eksternal. Beberapa penelitian mencatat bahwa meskipun dana nagari tersedia dalam jumlah besar, pemanfaatannya sering kali belum optimal akibat keterbatasan kapasitas teknis dalam penyusunan rencana pembangunan nagari maupun monitoring program.

Temuan lain yang muncul disini adalah praktik inovatif penggunaan dana nagari yang digunakan selama pandemi COVID-19. Sebanyak 10 literatur mendokumentasikan bahwasanya dana nagari tersebut diarahkan untuk mendukung ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pada waktu itu seperti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), pembangunan lumbung pangan yang diperuntukan bagi nagari dan masyarakat, hingga berbagai program ketahanan kesehatan. Inovasi ini menunjukkan kemampuan adaptif nagari dalam menghadapi berbagai situasi krisis sekaligus mempertegas relevansi desentralisasi ketika dikombinasikan dengan modal sosial lokal yang beragam.

Namun demikian, isu yang paling banyak disoroti adalah kesenjangan antara teori dan praktik desentralisasi dengan jumlah literatur terbanyak yaitu 22 sumber. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun desentralisasi diyakini mampu memperkuat responsivitas pemerintahan lokal tetapi pada implementasinya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan, keterbatasan fiskal yang menimbulkan disparitas antar nagari, serta dominasi elite lokal dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 1 hasil kajian literatur menegaskan bahwa relevansi teori desentralisasi di Kabupaten Agam terletak pada kemampuannya dalam menjelaskan hubungan antara pelimpahan kewenangan, penguatan kapasitas kelembagaan nagari, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Namun pada prinsipnya tantangan implementasi masih perlu diatasi melalui penguatan berbagai regulasi yang mendukung, peningkatan kapasitas aparatur nagari, serta pelembagaan partisipasi masyarakat agar tujuan desentralisasi dapat diwujudkan secara optimal.

Pembahasan

Berdasarkan metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya kajian literatur ini menghasilkan sejumlah temuan konseptual yang dapat memberikan gambaran komprehensif secara nyata mengenai relevansi teori desentralisasi terhadap dinamika pemerintahan lokal di Indonesia khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan nagari di Kabupaten Agam. Hasil kajian diperoleh melalui penelaahan secara mendalam terhadap berbagai literatur mutakhir yang ada baik berupa teori-teori dasar, kebijakan pemerintah dari pusat maupun daerah, serta penelitian empiris yang relevan dan erat hubungannya. Analisis dilakukan secara tematik dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesenjangan antara teori desentralisasi dan praktik pemerintahan lokal.

Dengan adanya pendekatan ini, pembahasan nantinya diarahkan untuk memperlihatkan bagaimana teori desentralisasi dapat dipahami sebagai bagian dalam administrasi publik, bagaimana dinamika pemerintahan lokal berlangsung sebagaimana mestinya, serta bagaimana nagari di Kabupaten Agam menjadi arena aktualisasi desentralisasi dalam kerangka

pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori desentralisasi tetap relevan dalam menjelaskan dinamika pemerintahan lokal yang ada sekarang ini terutama dalam konteks nagari di Kabupaten Agam. Dampak yang akan dirasakan juga cukup dinikmati nantinya karena berkaitan erat dengan kesejahteraan perekonomian masyarakat yang ada di nagari dengan selalu berpedoman pada aturan yang berlaku.

Temuan tentang peran nagari, ketergantungan pada kapasitas kelembagaan, serta kesenjangan teori dan praktik memperlihatkan bahwa desentralisasi tidak semata-mata pelimpahan kewenangan administratif, melainkan juga sebuah instrumen yang menuntut kesiapan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, desentralisasi baru bermakna ketika dapat diterjemahkan dalam praktik pemerintahan lokal yang responsif, akuntabel, dan berakar pada modal sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2016) yang menekankan bahwa esensi desentralisasi adalah memperkuat kapasitas lokal dalam merespons kebutuhan warganya.

1. Teori Desentralisasi dan Relevansinya dalam Administrasi Publik

Desentralisasi telah lama dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan lokal. Desentralisasi umumnya dibedakan ke dalam tiga dimensi utama, yakni administratif, fiskal, dan politik. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan berfungsi untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih responsif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, gagasan tersebut diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang mulai diterapkan sejak tahun 1999, yang menandai perubahan besar dalam hubungan pusat-daerah dengan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan publik sesuai karakteristik wilayahnya masing-masing. Salah satu bidang krusial yang turut mengalami desentralisasi kewenangan adalah sektor pendidikan, yang secara resmi diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Diva & Nuruddin, 2024; Harahap, 2016; Maulina et al., 2024).

Namun, keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan, melainkan juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, relevansi teori desentralisasi sebagai kerangka konseptual tercermin dalam praktik pemerintahan nagari. Nagari berfungsi tidak hanya sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai arena demokratis yang mengakomodasi nilai musyawarah. Hal ini sesuai dengan pemikiran Syafri (2021) yang menegaskan bahwa desentralisasi harus dimaknai sebagai sarana memperkuat demokrasi lokal. Dalam praktiknya, musyawarah nagari memperlihatkan bahwa partisipasi warga merupakan aspek kunci dalam menghubungkan teori desentralisasi dengan realitas sosial budaya Minangkabau. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal, mengingat pemerintah kabupaten/kota memiliki jangkauan terdekat dengan masyarakat dan kapasitas untuk mengoptimalkan sumber daya daerah (Afrianti, 2020; Guntoro, 2021; Rudy, 2016; Siregar et al., 2023).

2. Dinamika Pemerintahan Lokal dalam Konteks Indonesia

Pemerintahan lokal di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan besar tentang bagaimana mengimplementasikan desentralisasi yang telah ada. Beberapa kendala utama yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan fiskal antar daerah, serta lemahnya koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa proses desentralisasi tidak selalu berjalan mulus karena setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda dalam mengelola kewenangan yang telah didelegasikan. Ketimpangan kapasitas ini kemudian berdampak pada perbedaan kualitas pelayanan publik serta pembangunan antarwilayah. Meskipun demikian, desentralisasi tetap memiliki potensi besar dalam

meningkatkan responsivitas kebijakan publik, terutama ketika masyarakat dapat dilibatkan secara aktif.

Partisipasi publik yang lebih luas memungkinkan kebijakan daerah disusun sesuai kebutuhan masyarakat setempat, sehingga mendorong akuntabilitas serta memperkuat legitimasi pemerintahan lokal. Selain itu, salah satu dampak positif yang terlihat dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia adalah munculnya berbagai inovasi daerah, seperti penerapan model partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun forum-forum partisipatif lainnya. Akan tetapi, efektivitas mekanisme ini masih sangat bergantung pada tingkat transparansi pemerintah lokal serta keberlanjutan komitmen politik dari para pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, dinamika pemerintahan lokal memperlihatkan adanya tantangan besar dalam kapasitas kelembagaan. Kapasitas kelembagaan nagari menjadi faktor penentu efektivitas pemberdayaan masyarakat. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa kelembagaan yang lemah menjadikan desentralisasi sebatas beban administratif tanpa menghasilkan pembangunan yang signifikan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa meskipun dana nagari tersedia dalam jumlah besar, pemanfaatannya sering kali belum optimal akibat keterbatasan aparatur nagari dalam perencanaan, pelaporan, dan pengawasan. Hal ini mempertegas pentingnya penguatan sumber daya manusia aparatur agar pemberdayaan dapat berjalan berkelanjutan. Demokratisasi pendidikan juga menghadapi kendala serupa, di mana kualitas pendidikan belum memuaskan meskipun telah didelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah (Affandi & Suastra, 2024; Amin & Isharyanto, 2022).

3. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Inti Desentralisasi

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting yang menegaskan relevansi teori desentralisasi dalam praktik pemerintahan lokal. Desentralisasi tidak hanya bermakna pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan. Pemberdayaan hanya dapat berjalan efektif apabila masyarakat diposisikan sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi serta menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan mereka sehari-hari. Peningkatan partisipasi ini krusial untuk memastikan inklusivitas dalam pengambilan kebijakan, sejalan dengan prinsip-prinsip postmodernisme yang menekankan pluralitas dan keterbukaan dalam pemerintahan (Hanifah et al., 2024).

Namun, pelaksanaan pemberdayaan lebih sering terkendala oleh adanya keterbatasan kapasitas sumber daya, rendahnya literasi kebijakan publik, serta dominasi elit lokal yang menghambat partisipasi inklusif. Banyak program pemberdayaan juga tidak berkelanjutan karena kurangnya integrasi antara dukungan pemerintah dan partisipasi komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan proses panjang yang menuntut konsistensi serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lain dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan. Relevansi pemberdayaan masyarakat sebagai inti desentralisasi semakin nyata melalui praktik inovatif pemanfaatan dana nagari selama pandemi COVID-19. Studi kasus ini menyoroti bagaimana fleksibilitas dalam penggunaan dana tersebut memungkinkan adaptasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, sejalan dengan penolakan homogenitas kebijakan publik dalam pemikiran postmodern (Habibani et al., 2025; Hanifah et al., 2024; Khaerunissa et al., 2023; Marbi & Widayat, 2025).

Menurut Haryanto (2020), desentralisasi memberi ruang fleksibilitas bagi pemerintah lokal untuk merancang kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan dana nagari untuk BLT, lumbung pangan, dan ketahanan kesehatan menjadi bukti nyata bagaimana otonomi lokal dapat menghasilkan kebijakan yang responsif dalam menjawab berbagai tantangan yang ada

meskipun tanpa adanya strategi keberlanjutan inovasi ini rentan terhenti setelah krisis berakhir. Sehingga dalam berbagai kesempatan peningkatan kapasitas sumber daya yang ada sangat dirasa perlu untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Namun, peningkatan kapasitas ini tidak akan berdampak signifikan apabila masyarakat tidak diberikan kewenangan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan, sehingga program pembangunan yang ada kurang relevan dengan kebutuhan aktual mereka (Firman, 2021; Huda & Sukadiono, 2021; Pratama et al., 2023).

4. Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat: Kasus Kabupaten Agam

Salah satu bentuk khas pemerintahan lokal di Indonesia adalah sistem nagari di Sumatera Barat. Nagari tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai wadah adat dan budaya Minangkabau yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Agam, nagari memiliki peran strategis dalam membangun model partisipatif berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai adat dengan tata kelola modern. Melalui pengelolaan dana nagari, masyarakat dapat diberdayakan lewat berbagai program sesuai kebutuhan setempat. Selama pandemi COVID-19, misalnya, beberapa nagari berhasil mengalokasikan dana untuk kesehatan, bantuan sosial, dan solidaritas lokal, yang menunjukkan relevansi desentralisasi ketika diadaptasi ke dalam konteks sosial-budaya. Namun, efektivitas nagari masih menghadapi kendala seperti kapasitas kelembagaan yang terbatas, konflik kepentingan elit, dan lemahnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa potensi nagari sebagai motor pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal belum sepenuhnya optimal. Keempat, pemerintahan nagari di Kabupaten Agam juga menegaskan bahwa desentralisasi harus dikaitkan dengan nilai budaya lokal.

5. Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Literatur menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara teori desentralisasi dan praktik di lapangan. Teori berasumsi bahwa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah otomatis meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (Faguet, 2019), namun realitas memperlihatkan hasil beragam dengan ketimpangan kapasitas antarwilayah serta perbedaan kualitas pembangunan. Hal serupa terlihat di Kabupaten Agam, di mana nagari berpotensi menjadi arena pemberdayaan berbasis kearifan lokal, tetapi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, dan minimnya dukungan kebijakan membuat fungsi tersebut belum optimal. Kondisi ini menegaskan bahwa desentralisasi bukan sekadar pemindahan kewenangan, melainkan harus disertai penguatan kelembagaan lokal, partisipasi masyarakat yang inklusif, sinkronisasi kebijakan antarlevel pemerintahan, serta transparansi dan pengakuan terhadap kearifan lokal agar tujuan pemerataan pembangunan dan akuntabilitas publik dapat tercapai.

Dengan demikian kajian literatur ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan administrasi publik di Indonesia dengan menegaskan bahwa teori desentralisasi tidak dapat diterapkan secara universal, melainkan harus disesuaikan dengan konteks spesifik wilayah. Dinamika pemerintahan nagari di Kabupaten Agam menunjukkan bahwa praktik desentralisasi sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan struktur adat, sehingga pendekatan teoretis perlu mempertimbangkan kearifan lokal agar mampu menjawab tantangan nyata, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta kebutuhan sinergi antarlevel pemerintahan. Meskipun artikel ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan kajian literatur tanpa data primer lapangan, pemanfaatan sumber-sumber terbaru tetap memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara teori desentralisasi dan dinamika pemerintahan lokal.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan konsep relevansi teori desentralisasi dalam konteks Kabupaten Agam khususnya terkait pemberdayaan masyarakat melalui sistem nagari, meskipun kesenjangan antara teori dan praktik masih terlihat akibat lemahnya kapasitas

kelembagaan, koordinasi antar pemerintah, dan tantangan sosial-budaya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi yang komprehensif dalam upaya peningkatan kemampuan berupa penguatan kapasitas nagari, perluasan partisipasi masyarakat, serta integrasi nilai lokal dalam kebijakan pembangunan agar terealisasi dengan baik sehingga nantinya desentralisasi benar-benar mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap tantangan yang ada, inklusif terhadap perkembangan zaman, dan berkelanjutan demi kesinambungan tuntutan kebutuhan yang terus meningkat.

Sehingga, relevansi teori desentralisasi dalam konteks Kabupaten Agam terletak pada kemampuannya dalam menjelaskan berbagai interaksi yang ada antara kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan inovasi lokal yang berkembang. Namun demikian agar desentralisasi ini menjadi sarana pembangunan yang berbasis masyarakat nantinya maka sangat diperlukan adanya transparansi yang memadai, penguatan kelembagaan secara aktif, serta terciptanya pelembagaan partisipasi yang mendukung. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2016) dan Syafri (2021), bahwa desentralisasi harus diposisikan bukan hanya sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai instrumen demokratisasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa teori desentralisasi memiliki relevansi yang sangat penting dalam memahami dinamika pemerintahan lokal, khususnya di Kabupaten Agam. Desentralisasi tidak hanya dipahami sebagai proses transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi juga sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Agam, nagari sebagai bentuk pemerintahan lokal khas Minangkabau berperan strategis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Nagari memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan pembangunan. Hal ini memperlihatkan bahwa teori desentralisasi benar-benar menemukan relevansinya ketika diterapkan dalam struktur pemerintahan yang berbasis pada kearifan lokal.

Meskipun demikian, dinamika pemerintahan nagari masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan, serta keberlanjutan program pemberdayaan yang belum sepenuhnya terjamin, seringkali menghambat tercapainya tujuan desentralisasi secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan nagari menjadi hal yang mendesak, baik melalui peningkatan kompetensi aparatur, penegakan regulasi, maupun pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari perlu diperluas agar tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar melibatkan berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok rentan. Koordinasi yang lebih erat antara nagari, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi juga penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan. Dengan demikian, desentralisasi di Kabupaten Agam akan lebih mampu mewujudkan pemerintahan lokal yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adabi. (2024). Decentralization and public participation: A literature review on impact and implementation. *Adabi: Journal of Public Administration and Business*, 11(1), 33–45. <https://adabi.ejournaladabiah.org/index.php/adabi/article/view/17>
- Affandi, L. H., & Suastra, I. W. (2024). Tantangan demokratisasi pendidikan Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 8(3), 1733. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7477>

- Afrianti, S. (2020). Rimbo larangan kearifan lokal masyarakat Minang Kabau untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. *Agroprimatech*, 3(2), 74. <https://doi.org/10.34012/agroprimatech.v3i2.917>
- Amin, R. I., & Isharyanto, I. (2022). Asymmetrical sequential decentralization: Resetting the paradigm of regional autonomy. *Journal of Governance and Regulation*, 11(4), 24. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i4art3>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE.
- Diva, J. D. I., & Nuruddin, M. (2024). Kelayakan media video interaktif berbasis KineMaster pada materi bagaimana bumi berubah kelas V SD. *Abuya Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.52185/abuyavol2iss1y2024403>
- Dwiyanto, A. (2016). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Faguet, J. P. (2019). Decentralization and governance. *World Development*, 122, 313–332. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.003>
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan masyarakat di desa berbasis komunitas: Review literatur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 132. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i1.196>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah. *Jurnal CENDEKIA Jaya*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Habibani, R. A., Asnil, A., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2025). Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(4), 1905. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i4.7823>
- Hanifah, Z., Fatimah, S., & Fitrisia, A. (2024). Pemikiran filsafat postmodern dalam membangun pemerintahan yang inklusif. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 588. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.4007>
- Harahap, E. K. (2016). Manajemen otonomi pendidikan di Indonesia. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 1(2), 137. <https://doi.org/10.32332/riayah.v1i02.104>
- Haryanto. (2020). *Otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Huda, F., & Sukadiono, S. (2021). Peningkatan penjualan melalui pendampingan online selling pada platform digital. *AKSIOLOGIYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 557. <https://doi.org/10.30651/aks.v5i4.10161>
- Khaerunissa, S., Hasanah, B., & Sururi, A. (2023). Kapasitas inovasi program dana pembangunan wilayah kelurahan dalam mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348>
- Marbi, S., & Widayat, T. N. E. (2025). Kapasitas kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 680. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6200>
- Mardiasmo. (2018). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah di Indonesia*. Andi Offset.
- Maulina, M., Ramli, M., & Musdalifah, M. (2024). Strategi kepala sekolah dan komite sekolah dalam pengembangan sarana prasarana di sekolah SMP Muhammadiyah 6 Makassar. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 346. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2898>
- Pamuja, I. A., Normelani, E., Kasyfi, M. F., Fathoni, M., & Iskandar, A. (2024). A new approach to community empowerment-based tourism village development in Indonesia. *Jurnal Geografika*, 21(2), 150–165. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jgp/article/view/15436>

- Pratama, W. B., Syarfi, I. W., & Hasnah, H. (2023). Efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat (studi kasus di nagari maju dan nagari berkembang). *Region Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 534. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.59446>
- Rahim, R. K., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Decentralization and local community welfare: Analysis based on literature studies. *Adabi: Journal of Public Administration and Business*, 11(1), 1–15. <https://adabi.ejournaladabiah.org/index.php/adabi/article/view/15>
- Rudy, R. (2016). Desentralisasi Indonesia memupuk demokrasi dan penciptaan tata pemerintahan lokal. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.529>
- Safitri, C., Valentina, T. R., & Putera, R. E. (2023). The utilization of kaum-based village funds as a form of strengthening the capacity of the nagari government during the COVID-19 pandemic. *Sosiohumaniora*, 25(3), 275–286. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/44998>
- Siregar, D. O., Simanjorang, E. F. S., & Prayoga, Y. (2023). Penyelenggaraan administrasi dalam mendukung good governance. *Munaddhomah Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(4), 398. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i4.307>
- Siswidiyanto, & Sahputri, R. A. M. (2023). Decentralisation and human development in Indonesia: The importance of local government capacity in delivering development outputs and outcomes. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 21(2), 393–419. [https://doi.org/10.4335/21.2.393-419\(2023](https://doi.org/10.4335/21.2.393-419(2023)
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Syafri, W. (2021). *Desentralisasi dan demokrasi lokal: Teori, kebijakan, dan praktik*. Prenada Media.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>